KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN KONFLIK DI KABUPATEN LUMAJANG

SOCIAL FUNCTIONING OF THE COMMUNITY IN PRONE TO CONFLICT AREAS IN LUMAJANG REGENCY

Ratih Probosiwi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Kasihan, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: ratihprobo@yahoo.com

Diterima: 25 Juni 2018; Direvisi: 19 Oktober 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengetahui keberfungsian sosial di daerah rawan konflik meliputi status, peran, dan norma sosial. Masyarakat daerah rawan konflik rentan terhadap provokasi karena adanya ketidakpercayaan antar masyarakat yang mampu memicu tersumbatnya pelaksanaan fungsi sosial di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang dengan melihat adanya konflik sosial akibat penambangan pasir ilegal yang akhirnya memicu kasus Salim Kancil. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Keberfungsian sosial dikupas dalam tiga hal yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi goncangan serta tekanan dengan melihat pola relasi sosial masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar wilayah konflik mengalami kesulitan menjalankan fungsi sosial terutama terkait peran yang dijalankan. Secara umum, masyarakat mengalami hambatan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dikarenakan lahan dan mata pencaharian mereka hilang; dalam menjalankan peran sosialnya, masyarakat terbatas oleh intimidasi kelompok pro penambangan pasir ilegal; sedangkan dalam kemampuan menghadapi tekanan masyarakat mampu mengelola konflik tanpa menggunakan kekerasan walaupun memperoleh intimidasi sedemikian rupa. Direkomendasikan untuk mendampingi daerah rawan konflik melalui program pemberdayaan ekonomi yang mampu melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai wadah pertemuan warga untuk mengurangi perbedaan pendapat dan sebagai wadah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat.

Kata Kunci: *konflik, fungsi sosial, relasi sosial, pendampingan, pemberdayaan.*

Abstract

This paper aims to determine social functioning in conflict prone areas including status, role, and social norms. Conflict-prone local communities are vulnerable to provocation because of the mistrust between communities that can trigger the clogging of social function in society. The research was conducted in Selok Awar-awar Village, Pasirian Sub-district, Lumajang Regency by seeing the social conflict caused by illegal sand mining which eventually triggered the case of Salim Kancil. Primary data obtained through in-depth interviews, observation, and literature study. Social functionality is discussed in three ways: the ability to meet basic needs, perform social roles, and face shock and pressure by observe its social relationship. Research shows that communities around the conflict area have difficulty in performing social functions, especially related to the role that is carried out. In general, communities face barriers to meeting basic economic needs due to their lost land and livelihoods; in carrying out its social role, society is limited by intimidation of pro illegal sand mining groups; while in the ability to cope with the pressures of the community are able to manage the conflict without resorting to violence despite intimidation in such a way. It is recommended to assist conflict-prone areas through economic empowerment programs that are capable of implementing two functions, namely as a place for community meetings to reduce disagreements and as a means of increasing revenues to reduce community disparities.

Keywords: *conflicts, social functioning, mentoring, empowerment*

PENDAHULUAN

Faktor kekuasaan dan ekonomi sejak dahulu menjadi penyebab terjadinya konflik, misalnya konflik masyarakat pribumi dan orang peranakan Cina pada saat VOC menyerahkan beberapa kawasan kepada pengusaha Cina. Semenjak itulah para penguasa lokal dan masyarakat pribumi melakukan pemberontakan. Konflik antara masyarakat pribumi dan pendatang ataupun peranakan dapat menjadi konflik laten atau tersembunyi. Di permukaan, masyarakat menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, namun bukan berarti tidak ada sentimen negatif dari tiap anggota masyarakat (Rahman, 2013).

Konflik sosial yang terjadi antar komunitas menjadi potensi perusak ketertiban sosial bahkan kesatuan bangsa dan negara (Sumartias & Rahmat, 2013). Memudarnya ikatan sosial di tengah masyarakat sangat mungkin disebabkan melebarnya kesenjangan ekonomi serta merosotnya berbagai modal sosial dan juga lunturnya saling percaya antar masyarakat. Konflik sosial terjadi sebagai refleksi dari carut-marutnya kondisi politik masyarakat. Seperti pernah disebutkan, bahwa akar konflik sosial di Indonesia adalah motif sosial, yaitu pudarnya saling menghormati dan toleransi antar masyarakat; motif ekonomi, yaitu semakin lebarnya kesenjangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata; dan motif politik, yaitu adanya perbedaan kepentingan politik langsung atau gesekan kepentingan (Mustafa, 2015).

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok. Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial dapat bersifat asosiatif-kerjasama dan disosiatif-persaingan

(Astuti, 2012). Persaingan ini kemudian dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Di Indonesia, konflik yang terjadi berkisar antara kecemburuan sosial misalnya konflik Sambas dan Sampit, *retaliatory communalism* atau tindak kekerasan antar komunitas misal konflik Ambon dan Poso, dan *separatist communalism* atau konflik vertikal karena gerakan separatis misalnya konflik Aceh dan Papua (Koswara, Mildawati, & Tukino, 2005). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ranjabar, bahwa konflik di Indonesia disebabkan oleh dominasi suatu kelompok tertentu, persaingan dalam mencari mata pencaharian, adanya pemaksaan unsur kebudayaan, dan juga adanya potensi konflik yang terpendam (Eka, 2012). Di samping kecemburuan sosial, faktor politik dan SARA juga memicu konflik hanya saja muncul di saat tertentu, berbeda dengan kecemburuan sosial yang timbul hampir setiap hari. Kementerian Sosial menyebutkan paling tidak terdapat 143 daerah rawan konflik di seluruh Indonesia yang merupakan dampak dari kesenjangan kesejahteraan masyarakat (mediaindonesia.com, 2015). Dalam beberapa kasus, konflik digambarkan sangat merusak secara fisik misalnya kerusakan harta benda, korban jiwa, atau rusaknya fasilitas umum; namun dampak yang lebih besar dari konflik adalah adanya keretakan hubungan antar kelompok yang berbahaya bagi kesatuan bangsa. Konflik dalam dinamikanya mampu mengubah pribadi suatu individu, hal ini dikarenakan tekanan yang diperoleh secara terus menerus dapat mempengaruhi psikis seseorang atau dikatakan bahwa masyarakat akan beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dalam bentuk yang negatif.

Konflik juga diwujudkan dalam bentuk dominasi atau penaklukan yang dalam beberapa sisi mampu mengganggu gerak dan

kehidupan sosial masyarakat. Penaklukan atau dominasi seringkali bersifat negatif, padahal dalam melaksanakan fungsi sosial masyarakat membutuhkan akses dan ruang untuk bersosialisasi, memainkan peran sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pemenuhan keberfungsian sosial sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia karena dikatakan bahwa beberapa kasus penyakit bahkan kematian salah satunya disebabkan adanya ketersumbatan pemenuhan fungsi sosial (Saris, Aghajani, van der Werff, van der Wee, & Penninx, 2017). Keberfungsian sosial dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti status aktivitas sosial, relasi sosial, dan dukungan sosial. Beberapa indikator afeksi yang dapat digunakan misalnya tingkat kesepian, afiliasi, dan ketidakmampuan menerima orang lain. Edi Suharto menyatakan bahwa keberfungsian sosial dapat diukur melalui tingkat kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi guncangan serta tekanan. Berangkat dari hal tersebut, penting untuk mengetahui dampak konflik sosial dari sisi keberfungsian sosial masyarakat di daerah rawan konflik.

METODE

Tulisan ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Melalui metode ini, informasi aktual secara rinci digali untuk mengungkapkan kondisi masyarakat di daerah rawan konflik terkait fungsi sosial yang melekat. Kabupaten Lumajang dipilih sebagai lokasi penelitian dipicu dari munculnya kasus Salim Kancil terkait konflik lahan penambangan pasir. Data yang digunakan merupakan informasi komprehensif yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner yang diperkaya dengan observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif berdasar data empiris dan kajian pustaka. Aspek keberfungsian sosial yang

diteliti yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial dan menghadapi guncangan dan tekanan lingkungan yang setiap aspeknya dilihat pola hubungan atau relasi sosial yang terjalin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lumajang dan Potensi Pasir Besi

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.790,90 km² atau 3,74 persen dari keseluruhan luas Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Malang di barat. Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 197 desa dan 7 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Lumajang.

Nama Lumajang berasal dari nama tempat “Lamajang” yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1882 wilayah Lumajang berstatus Distrik (setingkat kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Wedana. Kemudian pada tahun 1886 statusnya dinaikkan menjadi *Afdeeling* (setingkat kabupaten), kepala pemerintahannya adalah seorang Patih Afdeeling. Tahun 1929 sistem pemerintahan di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi Kabupaten, dengan kepala pemerintahannya seorang Bupati (wikipedia.com, 2017).

Menurut data BPS tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 1.030.187 jiwa dengan 527.268 penduduk perempuan dan 502.919 penduduk laki-laki; naik sebesar 0,37 persen dibandingkan jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 1.026.384

jiwa. Kecamatan Pasirian mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 85.834 jiwa; diikuti Kecamatan Lumajang 81.869 jiwa dan Kecamatan Tempoh sebesar 81.087 jiwa.

Masalah kemiskinan menjadi masalah utama Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan ini juga menjadi program prioritas pembangunan daerah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang berdasarkan BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 118.510 jiwa atau 11,52 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 245.806,00. Pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Lumajang mengalokasikan dana pengentasan kemiskinan sebesar 91 miliar rupiah (lumajang.memo-x.com, 2017). Pemkab Lumajang bekerjasama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) menganalisis anggaran dengan instrumen *pro-poor and gender budget statement* yang ditujukan efektivitas penyerapan anggaran.

Wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai potensi bahan galian golongan C yang sangat besar dan berlimpah, selain bahan galian golongan C juga terdapat bahan galian golongan B, bahkan tidak menutup kemungkinan juga terdapat bahan galian golongan A. Namun untuk potensi Bahan Galian Golongan A, pada kenyataannya data dan informasinya masih sangat minim, sehingga perlu adanya kerja sama dengan pihak swasta untuk dilakukan survei dan penelitian lebih lanjut. Dan diharapkan agar nantinya dapat menarik investor untuk mau menanamkan modalnya pada sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang.

Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang dijumpai variasinya terbatas namun mempunyai potensi yang sangat besar, data dan informasi untuk bahan galian golongan C, meliputi lokasi keterdapatan, jumlah cadangan, dan mutunya. Keberadaan Gunung tertinggi

di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang mendorong dan membawa berkah dengan berlimpahnya bahan galian golongan C khususnya jenis pasir, batu, coral dan sirtu yang tak pernah habis dan berhenti mengalir. Potensi bahan galian golongan C jumlahnya bertambah terus sesuai dengan kegiatan rutin Gunung Semeru yang mengeluarkan material kurang lebih 1 (satu) juta m³/tahun. Bukan saja kuantitasnya yang sangat besar namun kualitasnya juga sangat baik dan terbaik di Jawa Timur. Berbagai penelitian menyimpulkan, unggulnya kualitas pasir Gunung Semeru karena kandungan tanah (lumpur) sedikit, butiran pasirnya standart serta warna dan daya rekatnya yang baik. Lokasi keterdapatan penambangan pasir dan batu cukup banyak, di antaranya di sepanjang Sungai/Kali Rejali, Kali Regoyo, dan Kali Glidig. Tepatnya berada di Kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempursari dan Pronojiwo Areal bahan tambang/galian pasir dan batu bangunan 82,5 ha dengan volume 5.976.625 m³. Areal pasir dan batu yang di eksploitasi baru 15 ha dengan volume 239.065 m³ atau hanya 4 persen dari kapasitas yang tersedia.

Selain endapan tersebut diatas, masih terdapat cukup besar endapan material disepanjang sungai di wilayah lain Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Demikian menurut survey beberapa investor yang datang. Area pasir yang mengandung zat besi itu bisa mencapai 60 ribu Ha. Selain itu rata-rata kadar besinya antara 30 hingga 40 persen. Areal tambang pasir besi membentang luas dan memanjang di pantai selatan. Kabupaten Lumajang kaya pasir besi ini lantaran pernah mendapat muntahan dari gunung Semeru. Kemudian dibawa air sungai hingga ke laut. Muntahan gunung ini membawa partikel zat besi, sehingga kemudian menjadi

pasir besi di tepi pantai. Pasir Besi di pantai selatan Kabupaten Lumajang, hasil survey kualitasnya terbaik di negeri ini. Sayangnya, belum diketahui banyak pihak sehingga yang mengelola di Pantai Wotgalih hanya satu tangan, itupun yang menggarap bukan orang pertama. Areal tambang pasir besi mencapai 2.650 ha. Lokasinya memanjang dalam satu deret di sepanjang pantai selatan. Tepatnya, di pantai selatan Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian. Jalan menuju ke lokasi sudah tersedia, tinggal menyediakan *basecamp* agar dapat memindah hasil penyulingannya ke lokasi lain lebih mudah ke arah pengiriman. Bagi investor dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang bakal mendapat kemudahan, baik perijinan, sarana jalan, dan sebagainya. Penambangan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun seluas 504,4 ha (20% dari kapasitas yang tersedia). Dari luas tersebut memiliki kapasitas produksi 115.200 ton per tahun. Diperkirakan 10 tahun ke depan memiliki kapasitas produksi 1.136.200 ton.

Disamping pasir besi Kabupaten Lumajang tersedia potensi tambang emas. Setidaknya ada 2 Desa yang dinyatakan memiliki kandungan emas, yaitu Desa Bulurejo, dan Desa Oro-Oro Ombo, keduanya berada di Kecamatan Tempursari, 60 km dari jantung Kota Lumajang. Asumsi tersebut didasarkan pada surat Direktorat Teknik Pertambangan Umum No. 1638/2013/DPT/1996 tanggal 25-06-1996 dan Surat Bupati lumajang No. 545/1571/434.51/1996 yang dinyatakan bahwa kedua desa tersebut memiliki kandungan emas.

Keunggulan pasir Lumajang menarik para penambang pasir di berbagai titik di Lumajang baik itu secara legal maupun ilegal. Penambangan pasir inilah yang kemudian memicu konflik secara umum di Kabupaten Lumajang, khususnya Kecamatan Pasirian.

Konflik Sosial dan Dinamika Masyarakat

Secara umum, konflik dimaknai sebagai gejala sosial yang kerap hadir dalam kehidupan sosial masyarakat. Kata “konflik” lazim dimaknai sebagai perselisihan atau pertentangan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Setiadi & Kolip, 2011).

Konflik merupakan gejala sosial yang pasti hadir dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk dari dinamika sosial. Dalam sudut pandang ilmu sosial, masyarakat merupakan arena konflik dan integrasi nilai ataupun unsur yang berbeda. Dalam konteks pembahasan konflik sebagai sebuah proses sosial, masyarakat memperoleh porsi perhatian yang besar.

Dalam mengatasi konflik, masyarakat memiliki daya pemersatu berupa nilai solidaritas dan toleransi, disamping daya pemecah yang memicu konflik sosial. Masyarakat memiliki potensi mengatasi konflik melalui saluran peran yang ada. Respons masyarakat terhadap pemicu konflik sangat menentukan keberlangsungan lingkungan sosialnya. Kemampuan masyarakat dalam menghadapi, mengelola, menyelesaikan, bahkan menghentikan konflik merupakan solusi atas konflik yang terjadi.

Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pada akhir tahun 2016 menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Hal ini karena munculnya sebuah video yang kemudian viral di dunia maya tentang pembunuhan Salim Kancil, petani aktivis penolak tambang pasir di Lumajang. Lumajang dikenal dengan kualitas dan kuantitas pasir yang sangat baik, dengan warna hitam pekat yang menandakan banyaknya kandungan besi serta sangat bagus untuk konstruksi bangunan. Keunggulan pasir

Lumajang menarik penambangan pasir di berbagai titik di Lumajang baik itu secara legal maupun ilegal. Kehadiran penambangan pasir ilegal berdampak langsung pada masyarakat, khususnya petani karena merusak hutan wisata dan jalan sepanjang areal pertanian. Masyarakat menolak penambangan pasir dan membuat forum untuk melakukan mediasi dan advokasi protes kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir.

Gejolak yang terjadi masyarakat ternyata tidak didukung oleh kepala desa. Kepala Desa Selok Awar-awar membiarkan penambangan pasir ilegal yang secara pribadi memberikan keuntungan. Kepala desa sebagai pemimpin formal tertinggi di desa seharusnya menjadi figur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya harus menjalankan peran sebagai organisator, fasilitator, inovator, dan motivator dalam rangka pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat (Probosiwi & Utomo, 2016). Fungsi kepala desa berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan di luar situasi sosial masyarakat. Kenyataan yang terjadi, kepala desa menjadi tokoh utama dibalik pembunuhan Salim Kancil karena Salim dianggap menghalangi penambangan pasir di wilayahnya. Kepala desa menempatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya di atas kepentingan kesejahteraan masyarakat desanya. Dominasi kepala desa sebagai bentuk dampak negatif konflik, menimbulkan penaklukan kepada sebagian besar masyarakat yang berseberangan kepentingan.

Atas kasus Salim Kancil tersebut, masyarakat desa bereaksi dengan membuat aksi solidaritas dan menuntut keadilan dalam kasus tersebut. Solidaritas masyarakat ini merupakan salah satu bentuk dampak positif konflik yang

terjadi kala itu. Masyarakat yang semula diam dan takut atas kekuasaan kepala desa, kemudian bersatu menuntut keadilan kematian Salim Kancil. Konflik yang terjadi telah mampu menciptakan kekuatan dari masyarakat, memunculkan norma baru atau memunculkan kembali norma lama yang telah hilang sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Kasus Salim Kancil juga telah menyelesaikan konflik penambangan pasir ilegal. Sejak kasus Salim Kancil, penambangan pasir di sebagian wilayah Lumajang, terutama Kecamatan Pasirian, dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik mampu berubah menjadi pemecah masalah. Kasus penambangan pasir ilegal di Lumajang menunjukkan bahwa konflik mampu menimbulkan dampak negatif yaitu keretakan hubungan antarmasyarakat, penaklukan kepala desa kepada masyarakat, dan kematian Salim Kancil; serta dampak positif yaitu tumbuhnya solidaritas dan kekuatan masyarakat melawan kepala desa dan dihentikannya penambangan pasir ilegal.

Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial didefinisikan sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi atau merespons kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*) (Suharto, 2005). Kemampuan orang tersebut erat kaitannya dengan pola hubungan sosial yang muncul di lingkungan. Terdapat dua bentuk pola hubungan atau relasi sosial, yaitu 1) pola relasi sosial asosiatif, proses yang berbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi serta proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas kelompok; dan 2) pola relasi sosial disosiatif, proses yang berbentuk oposisi, misalnya persaingan, pertentangan, serta perselisihan (Astuti, 2012). Setidaknya

terdapat tiga klasifikasi keberfungsian sosial yaitu keberfungsian sosial adaptif, masyarakat rawan keberfungsian sosial, dan keberfungsian sosial maladaptif (DuBois & Miley, 2011). Keberfungsian sosial adaptif berarti, dalam konteks sistem sosial, adalah kemampuan memanfaatkan sumber personel, interpersonal, dan kelembagaan ketika menghadapi masalah, isu, dan kebutuhan. Suatu sistem dikatakan adaptif apabila cukup fungsional dalam memahami masalah dan melakukan langkah yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut.

Masyarakat di daerah rawan konflik adalah rawan mengalami disfungsi sosial. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat di daerah rawan konflik diasumsikan rentan mengalami kesulitan atau tidak mampu mengembangkan keberfungsian sosial secara optimal karena mengalami situasi negatif yaitu ketakutan ataupun ancaman. Pada saat kondisi tertentu, semisal puncak konflik, masyarakat di daerah rawan konflik mengalami keterbatasan dalam pergerakan dan interaksi sosialnya. Kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Desa Selok Awar-awar adalah salah satu lokasi penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Pantai Watu Pecak. Selok Awar-awar merupakan satu dari 11 desa di Kecamatan Pasirian dengan luas wilayah 14,78 km² dan jumlah penduduk 9.136 jiwa (2.486 rumah tangga). Rasio jenis kelamin penduduk Desa Selok Awar-awar menunjukkan angka 92,74 yang artinya bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki cukup seimbang (4.740 : 4.396). Penduduk Selok Awar-awar didominasi kelompok umur produktif, yang artinya bahwa secara ketenagakerjaan, Selok Awar-awar merupakan desa yang produktif. Berikut adalah komposisi umur penduduk Desa

Selok Awar-awar.

Tabel 1. Penduduk Desa Selok Awar-awar berdasar Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
0-4	619	35-39	723
5-9	723	40-44	757
10-14	963	45-49	685
15-19	599	50-54	607
20-24	687	55-59	542
25-29	692	60-64	382
30-34	670	≥ 65	757

Sumber: Kecamatan Pasirian dalam Angka 2016 (BPS Kab. Lumajang).

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Selok Awar-awar didominasi oleh petani sebanyak 1.289 jiwa, diikuti buruh tani 737 jiwa, industri 351 jiwa, dan penggalian/penambangan sebanyak 167 jiwa.

Tabel 2. Penduduk Desa Selok Awar-awar berdasar Mata Pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah
Petani	1.289
Buruh tani	737
Penggalian/penambangan	167
Industri	351
Konstruksi	279
Angkutan/komunikasi	112
perdagangan	685
Jasa	208
TNI/Polri/ASN	52
Total	3.880

Sumber: Kecamatan Pasirian dalam Angka 2016 (BPS Kab. Lumajang).

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa, baik itu sebagai petani maupun buruh tani meskipun Kecamatan Pasirian terkenal dengan penggalian pasir, tercatat hanya 167 penduduk atau 4,3 persen penduduk yang bekerja pada sektor penggalian/penambangan. Hal ini menunjukkan bahwa penggalian pasir di Kecamatan Pasirian,

khususnya Desa Selok Awar-awar, dilakukan oleh orang di luar wilayah tersebut.

Dengan maraknya penggalian pasir ilegal di wilayah desa, masyarakat terutama yang bersinggungan langsung dengan area penggalian pasir, menjadi terganggu. Jalan serta lahan pertanian yang mereka miliki rusak karena dilalui truk pengangkut pasir sementara pemerintah desa mendiamkan kondisi tersebut. Masyarakat yang pada awalnya berinteraksi dengan baik sedikit demi sedikit terdegradasi. Beberapa masyarakat kemudian membentuk kelompok untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah kelompok Salim Kancil. Kelompok Salim Kancil melakukan gerakan demonstrasi atas rusaknya jalan dan lahan pertanian serta mendesak dilarangnya penggalian pasir ilegal di Selok Awar-awar. Perlawanan yang dilakukan kelompok Salim Kancil menimbulkan ketegangan dengan kelompok yang mendukung penggalian pasir tersebut. Beberapa perselisihan terjadi yang mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sosial. Pola hubungan masyarakat berubah ke disasosiatif karena adanya perselisihan. Bentuk hubungan asosiatif yaitu kerjasama dan tolong menolong tetap terjalin, terutama dalam rangka menentang proses penambangan pasir ilegal. Aksi damai penyetopan penambangan pasir memicu tindakan pengancaman oleh kelompok kepala desa kepada anggota kelompok Salim Kancil bahkan puncaknya pembunuhan Salim Kancil dengan tersangka utama adalah kepala desa Hariyono. Penangkapan kepala desa atas pembunuhan Salim Kancil ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masyarakat masih dibayangi dengan ketakutan dan ketegangan. Salah satu kasus yang terjadi adalah pelemparan di salah satu rumah penolak penambangan pasir ilegal dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak

kepolisian melakukan pengamanan 24 jam di rumah aktivis antitambang (Liputan 6, 2015). Pasca pembunuhan Salim Kancil menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama mereka yang melihat penganiayaan dan pembunuhan Salim Kancil secara langsung. Hingga beberapa minggu, warga takut dan tidak mau membicarakan peristiwa tersebut karena sebelumnya terdapat ancaman bagi warga (Republika, 2015).

Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan keberfungsian sosial yang digambarkan sebagai berikut.

1. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini dianggap cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah rawan konflik. Kebutuhan akan rasa aman, kebebasan menyatakan pendapat dijabarkan dalam bentuk kemampuan keberfungsian sosial yang lain. Ekonomi tambang merupakan ekonomi elitis, karena seluruh proses transaksi publik hasil kegiatan pertambangan dilakukan di pusat kekuasaan, untuk kemudian dibawa masuk dalam arena pasar global, sehingga tidak melibatkan dan tidak terkait dengan ekonomi masyarakat petani dan nelayan (Mauk, Prayitna, & Amelia, 2015). Untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, masyarakat Desa Selok Awar-awar lebih banyak mengandalkan sektor pertanian padi dan palawija. Jagung menjadi komoditas utama pertanian, diikuti oleh padi dan beberapa tanaman palawija lain. Sepanjang masa konflik akibat penambangan pasir ilegal, aktivitas utama pertanian penduduk mendapat gangguan paling nyata. Beberapa sawah dan ladang lahan pertanian mengalami

kerusakan sehingga warga tidak dapat mengolah lahan dan mengalami penurunan hasil panen bahkan terdapat beberapa petani yang kehilangan mata pencaharian karena sama sekali tidak dapat mengolah lahan pertaniannya. Tercatat paling tidak terdapat 10 hektar lahan terdampak aktivitas penambangan pasir. Hasil wawancara menyatakan bahwa petani Selok Awar-awar mengalami penurunan penghasilan dari enam hingga tujuh juta rupiah menjadi paling banyak lima juta rupiah dalam sekali panen. Penurunan penghasilan ini tentu berpengaruh dalam kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Secara umum, kebutuhan dasar ekonomi masyarakat secara kuantitas ataupun kualitas mengalami penurunan. Aktivitas pasar juga berjalan seperti biasa selama penambangan pasir ilegal dan sedikit mencekam pascakasus Salim Kancil. Aktivitas sekolah selama proses penambangan pasir ilegal tidak mengalami hambatan dan berjalan seperti biasa karena memang tidak bersentuhan secara langsung. Demikian juga dengan kebutuhan akses kesehatan. Kecamatan Pasirian memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai yaitu 56 unit SD, 14 unit SLTP dan 5 unit SMA. Secara rasio guru-murid, pendidikan di Kecamatan Pasirian mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 di semua jenjang pendidikan SD hingga SMA. Pascakasus Salim Kancil, anak pelaku pembunuhan Salim Kancil mengaku takut bersekolah karena ramainya pemberitaan mengenai orangtua mereka. Demikian juga anak dari Salim Kancil yang mengalami trauma dan harus menjalani terapi hingga akhirnya kini kembali bersekolah. Hal tersebut berlangsung kurang lebih sebulan

pascakasus dan kini anak-anak tersebut telah kembali ke sekolah seperti biasa.

Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sangat terkait dengan pelaksana program pelayanan kebutuhan dasar, semisal pendidikan dan kesehatan. Selama konflik pro kontra penambangan pasir berlangsung, relasi atau hubungan antara masyarakat dengan pelaksana pelayanan kebutuhan dasar tidak mengalami gangguan. Hubungan yang terjalin sekian lama, menciptakan keakraban yang terbuka. Pelaksana pelayanan tetap bertindak profesional, namun kasus ditemukan bahwa terjadi pilih kasih dalam pengikutsertaan dalam program pembangunan ataupun perlindungan sosial yang dananya berasal dari dana pemerintah desa. Pemerintah desa yang dengan kekuasaan tertinggi kepala desa (tokoh penting dalam penambangan pasir ilegal) cenderung hanya mengikutsertakan kelompok masyarakat yang pro dengan kepentingan mereka.

2. Kemampuan Menjalankan Peran Sosial

Kemampuan menjalankan peran sosial erat kaitannya dengan kemampuan menjalankan tugas sesuai status sosial misalnya sebagai orangtua, anak, pelajar, karyawan, pemimpin, dan warga masyarakat (Safitri, 2016). Kemampuan ini terkait juga dengan interaksi yang terjalin, distribusi kekuasaan, heterogenitas dan pelayanan masyarakat (Purdananto, 2016). Dalam menjalankan peran sosialnya, masyarakat terhubung dengan orang lain, lingkungan dan pranata sosial yang melingkupi. Oleh karena itu, kemampuan menjalankan peran sosial dapat dilihat dari interaksi antarmasyarakat, makna yang diberikan komunitas, kewenangan komunitas atas urusan mereka sendiri, adanya distribusi kekuasaan merata, toleransi atas heterogenitas dan beda

pendapat, serta pelayanan masyarakat yang baik (Purdananto, 2016).

Selama proses penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-awar, masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pro penambangan pasir ilegal, kontra penambangan pasir ilegal, dan kelompok yang netral (mereka yang tidak mau ikut campur dalam perselisihan yang terjadi). Secara kasat mata, masyarakat berinteraksi cukup baik dan seolah tidak terjadi masalah apapun, namun jika kita melihat lebih dalam, terjadi “perang dingin” antarmasyarakat terutama antara kelompok pro dan kontra. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain, bahkan kelompok pro mengintimidasi lawannya baik itu secara fisik maupun psikis (ancaman). Kelompok netral juga harus berhati-hati dalam bergaul karena apabila terlalu dekat dengan salah satu kelompok akan dinilai menjadi bagian dari kelompok tersebut yang akibatnya dapat mengalami intimidasi yang sama yang dialami kelompok kontra (misal jika dia terlalu dekat dengan kelompok kontra). Hal ini terlihat bahwa kelompok pro penambangan pasir ilegal mencoba menghilangkan kelompok kontra sesuai dengan kepentingan dan keuntungan mereka pribadi. Kedua kelompok tersebut menganggap kelompok lain sebagai lawan atau musuh yang harus dihilangkan. Beberapa tindakan perlawanan dilakukan oleh kedua kelompok tersebut, semisal yang dilakukan oleh kelompok kontra yaitu dengan melakukan audiensi kepada Bupati Lumajang untuk menghentikan penambangan pasir ilegal. Tindakan tersebut mendapat balasan dari kelompok lawan dalam bentuk ancaman pembunuhan. Masyarakat secara umum menjadi tidak nyaman dalam berinteraksi karena merasa takut akan konflik yang terjadi antara kedua

kelompok tersebut.

Dalam hal internal kelompok, masing-masing kelompok saling menguatkan anggota, relasi asosiatif internal kelompok terjalin baik, apabila salah satu anggota mendapat ancaman, anggota yang lain berusaha melindungi. Hal ini untuk memastikan bahwa kelompok tidak pecah dan tujuan kelompok tercapai. Dalam kelompok kontra (bentukan Salim Kancil) misalnya, anggota kelompok dijaga dan dikuatkan pendiriannya dalam melawan penambangan pasir ilegal. Satu saja beralih haluan, mengakibatkan keraguan bagi anggota kelompok yang lain. Dalam kelompok kontra penambangan pasir ilegal, distribusi kekuasaan cenderung lebih merata dibandingkan kelompok pro dimana kekuasaan kepala desa lebih besar terkait pengambilan keputusan kelompok. Kepala desa memegang peran lebih kuat karena dia berhubungan secara langsung dan membuat kesepakatan dengan pihak penambang pasir. Tiap kelompok memiliki kewenangan untuk mengatur kelompoknya sendiri, mereka secara bebas dan mandiri membuat keputusan sesuai dengan kepentingan mereka, baik itu di kelompok pro maupun kelompok kontra. Beda pendapat yang terjadi biasanya disikapi dengan musyawarah walaupun dalam kelompok kontra pengaruh terbesar diberikan oleh kepala desa.

Di Desa Selok Awar-awar selaku tempat terjadinya konflik, ternyata kemampuan masyarakat dalam menjalankan peran sosialnya cukup baik dan tidak mengalami hambatan signifikan. Masyarakat baik itu di dalam kelompok (pro ataupun kontra) maupun di luar kelompok (masyarakat netral) dapat menjalin relasi sosial dengan cukup baik dan tidak mengalami hambatan pelayanan publik yang berarti. Relasi sosial

sedikit alot terjadi antara kelompok pro dan kontra dikarenakan mereka memiliki perbedaan pendapat yang cukup tajam. Dalam lingkungan kemasyarakatan, organisasi sosial masyarakat bentukan pemerintah masih berperan dalam memberikan pelayanan kepada warga desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih berpegang teguh pada nilai atau norma sosial yang ada, berpartisipasi baik dalam kegiatan pembangunan dan politik.

3. Kemampuan Menghadapi Guncangan dan Tekanan Lingkungan

Kemampuan menghadapi guncangan dan tekanan lingkungan erat kaitannya dengan perubahan dan dinamika sosial selama konflik terjadi hingga puncaknya pascakasus Salim Kancil, sementara kebutuhan rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Guncangan adalah kondisi tiba-tiba yang berdampak pada kerentanan sistem lingkungan seluruh komponennya, sedangkan tekanan adalah tren jangka panjang sebagai akibat dari guncangan yang terus menerus (Roussy, 2013). Aktivitas penambangan pasir ilegal pelan namun pasti telah menurunkan tingkat kenyamanan dan meningkatkan kerentanan masyarakat sekitar. Relasi disosiatif muncul sebagai akibat perbedaan dan perselisihan pendapat terkait penambangan pasir. Munculnya konflik sosial berupa perlawanan petani dan pemilik lahan atas aktivitas penambangan pasir yang kemudian berujung penganiayaan Tosan dan pembunuhan Salim Kancil membuktikan bahwa penambangan pasir ilegal memberi dampak negatif terutama secara sosial psikologis masyarakat. Secara psikologis, masyarakat mengalami tekanan dan memilih untuk diam dan sebagian kecil lainnya menyikapi dalam bentuk perlawanan baik itu secara langsung maupun

melalui perantara (kepolisian, pemerintah kabupaten, dan LSM).

Tekanan yang dialami masyarakat Desa Selok Awar-awar akibat penambangan pasir meliputi tekanan sosial dan ekonomi. Tekanan sosial berupa kriminalitas, intimidasi, kekerasan, kasus penganiayaan dan pembunuhan. Sedangkan tekanan ekonomi berupa hilangnya lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya hasil panen akibat kerusakan lahan pertanian. Dalam menghadapi penambangan pasir ilegal, masyarakat desa melakukan perlawanan menolak aktivitas penambangan pasir. Penolakan masyarakat tersebut diwujudkan dalam pernyataan sikap Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-awar yang dibentuk oleh 12 orang yaitu Tosan, Iksan Sumar, Ansori, Sapari, Salim Kancil, Abdul Hamid, Turiman, Hariyadi, Rosyid, Mohammad, Imam, Ridwan, dan Cokrowidodo. Mereka melakukan gerakan advokasi protes dengan cara mengirim surat penolakan penambangan pasir kepada Pemerintah Desa Selok Awar-Awar, Pemerintah Kecamatan Pasirian, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya mereka meminta audiensi kepada Bupati Lumajang terkait penolakan tambang pasir hanya saja tidak direspons oleh Bupati dan hanya diwakilkan oleh Camat Pasirian. Forum juga melakukan aksi damai penyetopan aktivitas penambangan pasir yang kemudian menghasilkan surat pernyataan kepala desa untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir. Surat pernyataan tersebut ternyata diikuti pengancaman dan intimidasi oleh kelompok pro penambangan pasir kepada kelompok kontra. Atas tindakan pengancaman tersebut, kelompok kontra membuat surat pengaduan terkait penambangan

liat oleh oknum aparat desa. Mereka juga berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan masyarakat terkait rencana aksi penolakan penambangan pasir yang kemudian berujung pada penganiayaan dan pembunuhan Salim Kancil. Setelah kasus pembunuhan Salim Kancil, upaya penyelesaian dilakukan oleh aparat kepolisian.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok kontra selalu mengupayakan aksi damai, advokasi, dan bersurat dalam menolak penambangan pasir tanpa sedikitpun melakukan tindak kekerasan. Mereka terbukti memiliki kemampuan menghadapi tekanan dengan *kepala dingin* dan terorganisir dengan baik. Mereka lebih memiliki kemampuan *managing conflict* dibandingkan kelompok pro penambangan pasir yang selalu menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah. Masyarakat yang netral cenderung menyikapi konflik penambangan pasir dengan diam dan pasrah. Mereka seolah tidak mau terlibat dalam konflik yang terjadi dan menerima kondisi di lingkungan mereka walaupun sebenarnya juga menyayangkan penambangan pasir ilegal tersebut dikarenakan takut intimidasi kelompok pro penambangan pasir.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi berpengaruh pada pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam pemenuhan fungsi sosialnya. Keberfungsian sosial sebagai kemampuan seseorang dan/atau sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi guncangan serta tekanan mengalami beberapa distorsi atau gangguan. Penaklukan dan intimidasi yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok lain menghambat pemenuhan fungsi

sosial kelompok terintimidasi dan masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan adanya pola dominasi dalam hubungan atau relasi sosial di masyarakat Desa Selok Awar-awar. Dominasi menyebabkan pola relasi sosial lain yaitu integrasi dan pluralisme yang lebih mengakui perbedaan, tidak terwujud.

Masyarakat di sekitar wilayah konflik penambangan pasir ilegal mengalami hambatan menjalankan fungsi sosial terutama terkait peran yang dijalankan. Masyarakat mengalami gangguan karena, hasil panen mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga petani mengakibatkan kerugian ekonomi. Dalam menjalankan peran sosial, masyarakat terbatas oleh intimidasi kelompok pro penambangan pasir ilegal. Interaksi antar masyarakat terganggu karena mereka harus berhati-hati dalam bergaul bila tidak mau mendapat intimidasi dari kelompok pro penambangan pasir ilegal. Dominasi kepala desa sebagai tokoh pro penambangan pasir menyebabkan masyarakat tidak bebas mengutarakan pendapat bahkan aspirasi masyarakat mengenai keberatan atas penambangan pasir dapat berujung ancaman dan intimidasi. Di permukaan, masyarakat terlihat harmonis bukan karena tidak ada sentimen negatif atau konflik tapi lebih pada tindakan hati-hati dan tidak mau terlibat dari pertentangan antara kelompok pro dan kontra. Dalam menghadapi guncangan dan tekanan, masyarakat mampu mengelola konflik tanpa menggunakan kekerasan. Masyarakat selalu mencoba menggunakan upaya represif dalam penyelesaian penambangan pasir ilegal walaupun tidak berhasil hingga kasus Salim Kancil terjadi. Upaya yang dilakukan masyarakat lebih pada kegiatan dialog, musyawarah dan advokasi penghentian penambangan pasir ilegal. Berbeda dengan kelompok pro penambangan pasir ilegal yang mencoba meredam pertentangan pendapat

dengan intimidasi dan kekerasan. Dalam masyarakat berkonflik di Desa Selok Awar-awar ditemukan pula dua pola relasi sosial yaitu asosiatif dan disosiatif. Pola relasi sosial asosiatif muncul dalam bentuk kerjasama di setiap kelompok pro dan kontra penambangan pasir dengan mengusung kepentingan dan tujuan kelompok masing-masing. Pola relasi disosiatif terwujud dalam pertentangan dan perselisihan antarkelompok terkait penambangan pasir ilegal.

SARAN

Disarankan untuk mendampingi daerah rawan konflik melalui program pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai wadah pertemuan warga untuk mengurangi perbedaan pendapat dan sebagai wadah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat (erat kaitannya dengan upaya menjalin kembali relasi sosial yang positif antarwarga). Selain membangun sarana fisik, disarankan untuk lebih fokus pada isi dari bangunan itu. Bentuk kegiatan yang disarankan yaitu penyuluhan dan sosialisasi mengenai kerukunan dan kebersamaan, lokakarya resolusi konflik, penguatan nilai dan kearifan lokal. Pemerintah daerah setempat hendaknya peka terhadap situasi masyarakat di daerah, pendampingan daerah rawan konflik tidak dapat terputus dan harus dilakukan terus menerus. Pemantauan rutin atas kondisi masyarakat, penjalinan tali koordinasi dan komunikasi dengan aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sebenarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

selaku pemberi dana penelitian ini. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Lumajang atas dampingan, fasilitas dan informasi yang diberikan selama proses pengumpulan data dilaksanakan; pengurus forum keserasian sosial dan masyarakat Desa Selok Awar-awar atas penerimaan dan informasi yang diberikan, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. (2012). Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian . *Skripsi*. Medan, Sumatera Utara, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.
- BBPPKS Bandung. (2002). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: BBPPKS Bandung.
- DuBois, & Miley. (2011). *Social Work an Empowering Profession 7th Edition*. Boston: Pearson.
- Eka, N. (2012). *Konflik dan Faktor Penyebab Konflik di Indonesia*. Retrieved August 14, 2018, from Gudang Ilmu Sosiologi Website: <http://gudangilmusosiologi.blogspot.com/2012/10/konflik-dan-faktor-penyebab-konflik-di.html>
- Fahrudin, A. (2007). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamila, N. (2010). Keberfungsian Sosial Keluarga Komunitas Pemulung. *Jurnal Dakwah Vol. XI No 1 Januari-Juni*, 43-66.
- Kasim, M. (2006). *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi*

- Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia.
- Koswara, H., Mildawati, M., & Tukino. (2005). *Menyiram Bara Api Konflik*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Liputan 6. (2015, November 02). *Adik Kades Selok Awar Awar Serang Rumah Teman Salim Kancil*. Retrieved from Liputan 6: <http://news.liputan6.com/read/2355288/adik-kades-selok-awar-awar-serang-rumah-teman-salim-kancil>
- lumajang.memo-x.com. (2017, April 13). *Rp 91 Miliar untuk Entaskan Kemiskinan di Lumajang*. Retrieved from lumajang.memo-x.com: <https://lumajang.memo-x.com/1703/rp-91-miliar-untuk-entaskan-kemiskinan-di-lumajang.html>
- Mauk, W., Prayitna, A. S., & Amelia N, H. M. (2015). *Tambang Pasir Ilegal di Lumajang : Paper Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- mediaindonesia.com. (2015, September 02). *143 Daerah Rawan Konflik Diidentifikasi*. Retrieved from Media Indonesia: <http://mediaindonesia.com/read/detail/6903-143-daerah-rawan-konflik-diidentifikasi>
- Mustafa, R. (2015, June 24). *Potensi Konflik di Tahun Politik*. Retrieved from Kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/rulimustafa/potensi-konflik-di-tahun-politik_551f5c3aa33311182ab67135
- Pasaribu, R. B. (2013). *Konflik sebagai Proses Sosial*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Probosiwi, R., & Utomo, G. S. (2016). *Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40 No 3, Desember , 287-298.
- Purdananto, F. (2016). Keberfungsian Sosial Masyarakat Desa Sukorejo Terkait Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Pacitan Jawa Timur. *Skripsi*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
- Raharjo, S. T. (2013). Kearifan Lokal, Keberfungsian Sosial dan Penanganan Bencana. *Share Social Work Journal Vol 3 No 2*, 111-125.
- Rahman, N. E. (2013). Konflik dan Kecemburuan Sosial Antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan di Daerah Besuki - Situbondo. *The 5th International Conference on Indonesia Studies : "Ethnicity and Globalization"* (pp. 173 - 183). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Republika. (2015, October 08). *Warga Selok Awar-Awar Masih Trauma*. Retrieved from Republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/10/08/nvw0o95-warga-selok-awarawar-masih-trauma>
- Roussy, S. (2013, April). Enhancing Resilience to Shocks and Stresses. *Briefing Paper*. Paris: ACF International.
- Safitri, D. (2016, Mei 12). Keberfungsian Sosial Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pasca Rehabilitasi di APPS WCC Sragen. *Skripsi*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Fakultas

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Saris, I., Aghajani, M., van der Werff, S., van der Wee, N., & Penninx, B. (2017). Social Functioning in Patients with Depressive and Anxiety Disorders. *Acta Psychiatr Scand Vol. 136*, 325 - 361.

Setiadi, E., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siporin, M. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. London: Collier Macmillan Ltd.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, Juli*, 13 - 20.

Thakeray, Faley, & Skidmore. (1994). *Introduction to Social Work*. New Jersey: Prentice Hall.